



**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA  
UNIT SIMPAN PINJAM TERHADAP PENINGKATAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TONJONG  
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Lina Rosalina

022116065

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
2021**

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA  
UNIT SIMPAN PINJAM TERHADAP PENINGKATAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TONJONG  
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA., CCSA., CA.,  
CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA  
UNIT SIMPAN PINJAM TERHADAP PENINGKATAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA TONJONG  
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari: Selasa, Tanggal 19 Januari 2021

Lina Rosalina  
022116065

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



(Monang Situmorang, Drs., Ak., MM., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE.,  
CFrA., CA., QIA., CGCAE.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Ellyn Octavianty, S.E., M.M.)

## ABSTRAK

Lina Rosalina 022116065. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Pembimbing: Ernadhi Sudarmanto dan Ellyn Octaviany. 2020.

Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui manfaat BUMDes bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa. (2) Untuk mengetahui efektivitas BUMDes pada unit simpan pinjam bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes yang berada di Kecamatan Tajurhalang. jenis data yang diteliti adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan *survey* lapangan yang terdiri dari observasi, dokumentasi, kuisioner dan wawancara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dengan bantuan SPSS versi 25 dan skala Likert. Pengujian yang dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif dan uji instrumen data (uji validitas dan uji realibilitas).

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas BUMDes Kurnia Abadi pada saat ini dapat dinyatakan masih berjalan tidak baik. Masih banyak kendala yang dihadapi yaitu kurangnya antusias masyarakat untuk ikut partisipasi, baik menjadi pengurus BUMDes atau menjadi nasabah, kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh BUMDes sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat adanya BUMDes yang mengakibatkan perekonomian masyarakat di desa Tonjong masih termasuk ke kategori tidak baik

Kata Kunci: Efektivitas, Peningkatan Perekonomian Masyarakat, dan BUMDes.

NOMOR : 73/KEP/REK/IX/2020  
TENTANG : PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER  
INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lina Rosalina  
NPM : 022116065

Judul Skripsi: Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada  
Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan  
Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan  
Tajurhalang Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Januari 2021



Lina Rosalina

022116065

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur seraya penulis panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor”**. Dalam proses penyusunan skripsi penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun Alhamdulillah tidak melunturkan semangat penulis dalam menyusun skripsi ini. Dalam pembuatan skripsi ini mulai dari perancangan, pencarian bahan, sampai penulisan, penulis mendapat bantuan, saran, petunjuk dari banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi pembahasan materi maupun teknik penulisan. Tanpa bimbingan dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
2. Kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA, PIA., Ibu Dra. Hj. Sri Hartini, MM dan Bapak Dr. Chaidir, S.E., MM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA selaku Dosen Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal seminar.
8. Ibu Ellyn Octavianty, S.E., M.M selaku Dosen Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal seminar.

9. Dosen-dosen Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi saya.
10. Seluruh staff Tata Usaha dan pelaksana Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
11. Seluruh pengurus BUMDes Kecamatan Tajurhalang yang telah memberikan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kakak tercinta Rohman Alfariza dan Erlina Horismayanti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
13. Ponakan tercinta Adzkiya Apriliaturrahma dan Azlan Althafurrahman Tsaqif yang selalu bersikap menggemaskan yang dapat menghilangkan penat dalam proses penulisan proposal.
14. Teman dekat terkasih Rahamd Yani yang selalu memberi semangat yang dapat membuat penat dikepala hilang seketika.
15. Teruntuk teman-teman kelas A dan B Akuntansi angkatan 2016 selama 3 tahun lebih kita selalu bersama, kelas yang penuh konflik tetapi selalu ceria, selalu semangat dan tidak pernah berhenti berjuang, *see you on top geng's*.
16. Teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Sektor Publik 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat yang sangat berperan penting Sartika Sinaga, Firda Nurmalia, dan Novia Yuniar yang telah banyak membantu penyusunan proposal penelitian ini.
18. Sahabat-Sahabat tercinta yaitu Novia Yuniar, Sartika Sinaga, Nurhani Salamah, Anti Melati, Fahreza Supriadi, R. Ajeng Rahmawati, dan Megari Siti Aprilla yang selalu bersedia membantu, menjadi pendengar dan penasihat yang baik, serta menjadi penyemangat bagi penulis disaat mengalami masa-masa sulit, *I love you gaes*.
19. Teman-teman bimbingan dan seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi S1 Prodi Akuntansi Tahun 2016 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis sehingga dalam penyusunan dan penyelesaian proposal ini masih banyak sekali kekurangannya, namun kekurangan tersebut semoga dapat menjadi suatu proses pembelajaran bagi penulis. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga proposal penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, Januari 2021

Penulis

Lina Rosalina

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PRODI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA</b> .....	<b>v</b>
<b>HAK CIPTA</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	
1.3.1 Maksud Penelitian .....	7
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Akuntansi Sektor Publik (ASP).....	8
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik (ASP) .....	8
2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik(ASP).....	9
2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.1.4 Bagian Akuntansi Sektor Publik .....	9
2.2 Efektivitas .....	10
2.2.1 Pengertian Efektivitas .....	10
2.2.2 Indikator Efektivitas.....	11
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	12
2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	12
2.3.2 Prinsip-prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	13
2.3.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	13
2.3.4 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	14
2.4 Simpan Pinjam .....	14
2.4.1 Pengertian Simpan Pinjam .....	14

2.4.2	Tujuan Koperasi Simpan Pinjam .....	15
2.4.3	Jenis Simpanan.....	15
2.4.4	Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam .....	16
2.5	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa .....	16
2.5.1	Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.5.2	Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.5.3	Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	17
2.5.4	Indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa .....	19
2.6	Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	20
2.6.1	Penelitian Terdahulu .....	20
2.6.2	Kerangka Pemikiran .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	26
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	
3.2.1	Objek Penelitian .....	26
3.2.2	Unit Analisis .....	26
3.2.3	Lokasi Penelitian .....	26
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	27
3.4	Operasionalisasi Variabel .....	27
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	29
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	29
3.7	Metode Pengolahan/ Analisis Data .....	30
3.7.1	Statistik Deskriptif .....	30
3.7.2	Uji Instrumen Data.....	32
3.7.2.1	Uji Validitas .....	32
3.7.2.2	Uji Reliabilitas.....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1	Sejarah dan Pengembangan BUMDes Kurnia Abadi .....	34
4.1.2	Kegiatan Usaha (Simpan Pinjam).....	35
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	36
4.2	Analisis Data.....	37
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.2.1.1	Deskripsi Tanggapan Responden .....	37
4.2.2	Uji Validitas .....	43
4.2.3	Uji Reliabilitas .....	44
4.3	Pembahasan.....	46
4.3.1	Manfaat BUMDes Pada Unit Simpan Pinjam Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong.....	46
4.3.2	Efektivitas BUMDes Pada Unit Simpan Pinjam terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong.....	47

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	51
5.2 Saran .....	51
5.2.1 Saran Praktis .....	51
5.2.2 Saran Akademis .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pembagian kategori Bumdes Menurut DPMD .....	4
Tabel 1.2 Data Unit Usaha Nasabah Simpan Pinjam .....	5
Tabel 2.1 Kumpulan Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	27
Tabel 3.2 Metode Skala dan Pengukuran.....	30
Tabel 3.3 Kriteria Skor Ideal.....	31
Tabel 3.4 Kriteria <i>Rating Scale</i> .....	31
Tabel 3.5 Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden .....	31
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	37
Tabel 4.2 Kriteria Tanggapan Responden.....	38
Tabel 4.3 Perhitungan Skor Kuesioner Variabel X.....	38
Tabel 4.4 Perhitungan Skor Kuesioner Variabel Y.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Logo BUMDes Kurnia Abadi .....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BUMDes Kurnia Abadi .....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran .....	56
Lampiran 1: Format Kuesioner .....	57
Lampiran 2: Formulir Pendaftaran Peserta BUMDes .....	61
Lampiran 3: Standar Operasional dan Prosedur (SOP) BUMDes .....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia terbesar keempat di dunia dengan jumlah hampir 270.054.853 jiwa penduduk pada tahun 2018. Banyaknya populasi penduduk di Indonesia dinilai merupakan salah satu faktor penyebab mengapa pemerintah belum dapat mensejahterakan penduduknya dengan meningkatkan perekonomiannya secara merata.

Jika berbicara mengenai kesejahteraan dan peningkatan perekonomian, tentu sudah tidak asing lagi dengan kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal utama yang harus dibenahi oleh pemerintah guna untuk meningkatkan perekonomian serta mengurangi kesenjangan sosial. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah harus ikut serta dalam peningkatan tersebut. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak dari sekian lama. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas sebagaimana dicantumkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2004 yang terbentuk undang-undang. Untuk mendukung hal itu, pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK).

Di Indonesia, urusan penanggulangan kemiskinan telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945 khususnya dalam beberapa pasal berikut, yaitu Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih jauh ditegaskan pada pasal 28 C ayat 1 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, pasal 28 D ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28 H (ayat 1-4) berturut-turut menegaskan soal jaminan hak hidup dan sejahtera bagi warga negara. Ayat 1 adalah setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 3 berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Berdasarkan Nawacita yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat salah satu dari Sembilan isi Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menjadi salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang strategis. Di mana, menguatkan daerah terendah (desa) untuk dapat menghasilkan pendapatan serta meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Desa merupakan target utama pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, karena di Indonesia banyak desa yang tertinggal dari segi pembangunan serta perekonomiannya. Seperti diketahui bahwa masyarakat di pedesaan jauh dari kesan maju, segala aktifitasnya masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan karena kurangnya teknologi modern masuk didalamnya. Jika pun ada, teknologi hanya sekedar membantunya dalam beberapa hal, tetapi tidak banyak memberikan dampak pada perekonomian masyarakatnya secara menyeluruh.

Pembangunan desa sangat dibutuhkan saat ini dan peran pemerintahlah yang diutamakan dalam pembangunan desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat dalam segi sarana dan prasarana, namun tetap masyarakat yang bertanggungjawab atas pengelolaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Terciptanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia yang merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. KDPDTT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas KDPDTT mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Desa memiliki program untuk mewujudkan desa-desa di Indonesia lebih maju. Salah satu program yang dibentuk oleh kementerian desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga badan hukum yang membentuk strategi-strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian dengan cara membentuk unit-unit usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar desa, guna meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkat perekonomian masyarakat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja mengumumkan pada Juli 2018, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa.

Bumdes sendiri tentunya sangat butuh pembinaan, dan juga butuh pengawasan. Jangan sampai BUMDes hanya menjadi sebuah *project* atau kegiatan tahunan yang 1 tahun habis, tahun depannya tidak dianggarkan sehingga akan mati dengan sendirinya. Kementerian Desa harus mendorong pendirian BUMDes agar benar-benar matang dan harus dikaji oleh desa apakah BUMDes tersebut bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi *project* segelintir orang, dikuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang dengan baju BUMDes. Sebagaimana diketahui pendirian BUMDes harus berdasar pada beberapa prinsip, yaitu 1) Bermanfaat bagi masyarakat desa, 2) Menguntungkan untuk BUMDes dan desa tersebut, 3) Keberlangsungan dan Keberlanjutan BUMDes. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 15 Des 2019).

Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada juli 2018, jumlah BUMDes di Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adapun permasalahan yang dihadapi hingga saat ini adalah sebagian besar BUMDes hanya sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan untuk desa tersebut. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang yang diakibatkan oleh rendahnya pemahaman mengenai BUMDes pada sebagian besar kepala desa tersebut, untuk Jawa Barat sendiri telah memiliki 5.312 Desa, namun baru 69,5 % atau 3.695 yang memiliki BUMDes. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini, masih terdapat BUMDes yang sedang dalam proses pembentukan yaitu mencapai 868 BUMDes atau sekitar 16,34% dan ada juga yang belum memiliki BUMDes jumlahnya 749 desa atau kurang lebih 14,1%. Jika dihitung dari 3695 Bumdes yang ada, 20% tidak berjalan.

Terdapat beberapa alasan mengapa desa banyak yang tidak memiliki BUMDes, diantaranya adalah kurangnya informasi mengenai apa itu BUMDes, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mewakili kapasitas, kesulitan dalam mencari modal awal, hingga trauma karena melihat banyaknya BUMDes lain yang mengalami kegagalan.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor memiliki 416 desa, namun hanya 276 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 189 BUMDes yang dinyatakan aktif. 189 BUMDes tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu maju, berkembang, dan dasar.

Tabel 1.1  
Data pembagian kategori Bumdes Menurut DPMD

<b>Jumlah Bumdes</b>	<b>Kategori</b>
2	Maju
22	Berkembang
165	Dasar

Sumber : data diolah penulis, 2019

Perkembangan BUMDes di kabupaten Bogor dinilai masih cukup masif. Hal tersebut terlihat dari data diatas, bahwa dari 189 BUMDes yang ada, 2 diantaranya berkategori maju, 22 berkategori berkembang sedangkan 165 berkategori dasar. Banyak desa yang telah mendirikan BUMDes tersebut namun kurang memahami bagaimana caranya memanfaatkan dan mengelola dana BUMDes tersebut dengan baik. Selain itu, kemampuan SDM yang masih terbatas, kurang maksimalnya alokasi anggaran, penentuan jenis usaha tanpa melalui uji kelayakan khusus, serta terbenturnya pergantian kepala desa sehingga terkadang susunan keanggotaan BUMDes juga berganti dan harus kembali lagi dari awal dinilai menjadi faktor penghambat pertumbuhan BUMDes di kabupaten bogor. (radarbogor.id, diakses pada 15 des 2019).

Salah satu BUMDes yang berada di kabupaten bogor adalah BUMDes Kurnia Abadi desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang. Kurnia Abadi merupakan BUMDes yang termasuk kedalam kategori BUMDes berkembang. Adapun beberapa unit usaha yang direncanakan akan didirikan oleh BUMDes Kurnia Abadi yaitu penyewaan alat pesta, penyewaan kios, pertanian, perdagangan, simpan pinjam, pegadaian, bio gas, serta pengembangan desa wisata. BUMDes Kurnia Abadi memiliki rencana untuk menambahkan unit usaha seperti *café* dan jasa penyedia internet.

Namun, dari semua unit usaha yang telah direncanakan tersebut, hanya unit simpan pinjam yang berjalan sampai dengan saat ini. Simpan pinjam merupakan salah satu jenis usaha yang mampu mendukung sistem permodalan para pelaku ekonomi desa yang dapat mendukung segala jenis usaha masyarakat desa itu sendiri. Simpan

pinjam desa ini memiliki peran fundamental dalam memacu produktivitas ekonomi warga desa. Sesungguhnya kehadiran unit simpan pinjam desa (perbankan desa) memiliki kekuatan besar bagi suatu desa.

Sebagaimana diketahui, unit simpan pinjam BUMDes Kurnia Abadi baru diresmikan dalam waktu kurang lebih satu tahun, dan telah memiliki 50 nasabah dari total masyarakat desa. Adapun nasabah yang meminjam uang untuk modal usaha akan dikenakan bunga sebesar 2% dari total pinjaman setiap bulannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus BUMDes tersebut, kebanyakan nasabah yang meminjam uang pada BUMDes Kurnia Abadi memiliki tujuan untuk menjalankan usaha perdagangan, seperti berjualan buah, es kelapa, menjual sembako, menjual kue kering, warung sayuran (menjual sayuran, ikan asin, dll), berjualan gado-gado, membuka usaha pom bensin mini, atau membuka usaha *home industry* agar-agar. Selain untuk usaha tersebut, terdapat beberapa nasabah yang meminjam uang untuk modal membuat peternakan sapi, dimana sapi tersebut dipelihara dan kemudian akan dijual kembali.

**Tabel 1.2**  
**Data Unit Usaha Nasabah Simpan Pinjam**

No.	Bidang Usaha	Unit Usaha
1.	Perdagangan	- menjual buah - menjual sembako - menjual sayuran (warung) - pom bensin mini
2.	<i>Home Industry</i>	Pembuatan agar-agar
3.	Peternakan	Ternak sapi
4.	Kuliner	- menjual es kelapa - menjual kue kering - menjual gado-gado

Sumber : data diolah penulis, 2019

Sejauh ini, masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh BUMDes Kurnia Abadi. Salah satunya yaitu efektivitas pengelolaan BUMDes yang belum berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat desa yang tidak terjun langsung untuk berpartisipasi dalam mengelola BUMDes ini, sehingga pengelolaan keuangan unit simpan pinjam tidak berjalan dengan baik. Mulai dari pencatatan pelaporan tagihan

sampai pencatatan keuangan keluar yang masih berantakan yang mengakibatkan masyarakat pun dapat melalaikan peraturan yang telah dibuat oleh ketua BUMDes yang mengakibatkan pendapatan dana BUMDes terhambat untuk dikembalikan kembali kepada masyarakat, juga tidak terealisasinya rencana tambahan unit usaha untuk membantu meluasnya lapangan pekerjaan.

Pada dasarnya, keberadaan BUMDes di suatu desa diharapkan oleh masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun tidak dengan BUMDes Kurnia Abadi, akibat dari ketidakefektifan pengelolaan BUMDes tersebut dirasa masih belum dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat desa, terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat dan masyarakat pun menganggap bahwa perekonomian di desa masih belum ada perubahan setelah adanya BUMDes Kurnia Abadi ini.

Maka, dari masalah diatas penulis ingin mengetahui bagaimana BUMDes sudah berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat yang walau pun hanya menjalankan satu unit usaha yaitu simpan pinjam. Oleh karena itu, penulis akan menuangkan dalam penelitian dengan judul "*Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor*".

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi oleh adanya program pemerintah yaitu dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena BUMDes merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk menguatkan daerah terendah yaitu desa untuk dapat menghasilkan pendapatan serta meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Program pemerintah ini dapat dikelola langsung oleh masyarakat desa dan diharapkan adanya BUMDes dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa menjadi lebih baik. Untuk BUMDes Kurnia Abadi sendiri masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh BUMDes tersebut salah satunya yaitu efektivitas pengelolaan BUMDes yang belum berjalan dengan baik. Masih banyak masyarakat desa yang tidak terjun langsung untuk berpartisipasi dalam mengelola BUMDes ini, sehingga pengelolaan keuangan unit simpan pinjam tidak berjalan dengan baik.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat adanya BUMDes pada unit simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tonjong?

2. Bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada unit simpan pinjam terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Tonjong?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas BUMDes pada unit simpan pinjam yang ada di desa Tonjong guna meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dibentuknya BUMDes ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manfaat adanya BUMDes bagi masyarakat desa
2. Untuk mengetahui efektivitas BUMDes pada unit simpan pinjam

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terdapat pada BUMDes Kurnia Abadi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi acuan dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan akuntansi sektor publik pada khususnya terutama yang berkaitan dengan efektivitas BUMDes.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik (ASP)**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik (ASP)**

Bastian (2007) Akuntansi Sektor Publik sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun dana proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Halim dan Kusufi (2014) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Sujarweni (2015) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu entitas atau organisasi publik yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan department-departemen dibawahnya

Mardiasmo (2018) Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas atau perlakuan akuntansi pada domain publik yang terdiri proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai suatu alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan yang berasal dari masyarakat agar dapat dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Sektor Publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang

membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Sektor Publik akan mengajarkan suatu ilmu akuntansi dalam ruang lingkup organisasi sektor publik. Sektor publik yang dimaksud antara lain seperti organisasi pemerintahan pusat dan daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), rumah sakit, dan pendidikan. Tentunya proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis laporan transaksi keuangan untuk organisasi sektor publik berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta, karena negara, khususnya lembaga pemerintah memiliki standar akuntansi tersendiri.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik (ASP)**

Menurut Wiratna Sujarweni (2015) di Indonesia, Akuntansi sektor publik mencakup beberapa bidang utama yakni :

- a. Akuntansi pemerintahan pusat
- b. Akuntansi pemerintahan daerah
- c. Akuntansi desa
- d. Akuntansi tempat peribadah : masjid, gereja, pura, wihara
- e. Akuntansi lembaga sosial masyarakat
- f. Akuntansi yayasan
- g. Akuntansi pendidikan : sekolah, perguruan tinggi
- h. Akuntansi kesehatan : puskesmas, rumah sakit

### **2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik (ASP)**

Tujuan akuntansi pada sektor publik oleh American Accounting Association (AAA) dalam Wiratna Sujarweni (2015), yaitu :

- a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*manajemen control*)
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada public atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

### **2.1.4 Bagian Akuntansi Sektor Publik (ASP)**

Dalam Sujarweni (2015) terdapat dua bagian dalam akuntansi sektor publik, yaitu :

- a. Akuntansi manajemen sektor publik  
Mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan (perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja) dan pengendalian

(mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan).

b. Akuntansi keuangan sektor publik

Mempelajari bagaimana menghasilkan transaksi-transaksi organisasi sektor publik tersebut dibukukan, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan pada periode tertentu bagi organisasi sektor publik. Adapun tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemegang organisasi, dan evaluasi kinerja pimpinan organisasi.

## 2.2 Efektivitas

### 2.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas menurut Kurniawan (2005) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaannya.

Sedarmayanti (2009) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Makmur (2011) mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat. Semakin efektif jika tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi rendah. Begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat kesalahan daripada rencana yang awal maka semakin tidak efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

### 2.2.2 Indikator Efektivitas

Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

#### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Adapun Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018), keuntungan dari BUMDes digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa, misalnya untuk membangun sekolah, jalan, kegiatan sosial dan lain-lain. Namun, BUMDes tidak diharapkan ‘mematikan’ bisnis masyarakat yang telah terlebih dahulu ada di suatu desa. Setiap BUMDes yang mampu hidup mandiri dan maju diwajibkan untuk membuat koperasi, dan kemandirian BUMDes dicirikan oleh laba yang meningkat, dan unit usaha dan/atau produk yang bervariasi.

Berdasarkan harapan-harapan tersebut, indikator kesuksesan (maju dan mandiri) BUMDes dapat dikategorikan menjadi empat:

1. Laba atau profit dan asset yang meningkat secara kontinu dan/atau konsisten. Hal ini terwujud salah satunya jika BUMDes memiliki perencanaan dan tujuan (planning and goals) yang baik, terdokumentasi dan terlaksana dengan baik pula
2. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar yang dituju melalui kemampuan menciptakan berbagai produk dan unit usaha, dan melalui kemampuan menciptakan berbagai kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan antara BUMDes dengan pihak-pihak lain (swasta dan pemerintah).
3. Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes. Hal ini termasuk kepuasan terhadap aspek manajemen organisasi dan kemampuan para karyawan dalam melaksanakan tugas.
4. Kepuasan masyarakat desa cenderung positif dan tinggi terhadap manfaat dari adanya BUMDes. Indikatornya apabila BUMDes mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan,

meningkatkan peluang pendidikan, memperbaiki akses transportasi dan lain-lain serta mencegah konflik (karena adanya persaingan dengan usaha-usaha sejenis di desa masing-masing).

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Tulisan ini menggolongkan tingkat efektivitas/keberhasilan BUMDes menjadi tiga kategori:

- a. Berjuang untuk hidup (*struggle for survive*), yaitu BUMDes yang belum mampu untuk menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten sejak didirikan, jaringan masih lemah, dan kepuasan pengelola serta masyarakat relatif rendah.
- b. Tumbuh (*growing*), yaitu BUMDes yang mampu memenuhi sebagian kriteria/indikator di atas. Misalnya, walaupun laba dan aset meningkat namun jaringan masih terbatas atau kepuasan masyarakat masih relatif rendah serta belum memiliki koperasi.
- c. Maju dan mandiri (*profitable and independent*), yaitu BUMDes yang telah memenuhi semua indikator di atas dengan relatif baik.

Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator efektivitas dalam teori ini sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat sebagai variabel yang peneliti jabarkan pada skripsi ini. Dimana, peneliti nilai lebih cocok apabila digunakan untuk mengukur efektivitas BUMDes secara umum atau keseluruhan.

## **2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDES adalah atas prakarsa masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Adapun, menurut Putra (2015) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga badan hukum yang membentuk strategi-strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian dengan cara membentuk unit-unit usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar desa, guna meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

### **2.3.2 Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan yang didirikan oleh masyarakat desa dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
- b. BUMDes adalah bersifat sosial (social entrepreneurship), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- c. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa.
- d. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

### **2.3.3 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam peraturan pemerintah desa (Permendes), pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada pasal 3 yang dijelaskan bahwa BUMDes memiliki tujuan yang terdiri dari:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui distribusi barang atau jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Pemdes). Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerak ekonomi masyarakat.

#### **2.3.4 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Dalam Undang-undang terbaru No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yaitu:

1. Pasal 87 mengenai Semangat yang Melandasi Pendirian dan Pengelolaan BUMDes
2. Pasal 88 mengenai Pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai Manfaat Berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai Arah Pengembangan Bisnis BUMDes yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Desa

Dari UU No. 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

## **2.4 Simpan Pinjam**

### **2.4.1 Pengertian Simpan Pinjam**

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dimaksud dengan simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor. 17 tahun 2012 bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009) simpan pinjam adalah Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk

kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Adapun menurut Rudianto (2010) pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam uang dengan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan.

#### **2.4.2 Tujuan Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan UU Nomor. 17 Tahun 2012 tujuan koperasi simpan pinjam adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009) tujuan koperasi simpan pinjam adalah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

#### **2.4.3 Jenis Simpanan**

Menurut Nur Fitriani (2012) ada beberapa jenis simpanan, yaitu:

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya
  - a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka satu tahun.
  - b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun.
  - c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu diatas 3 tahun.
2. Pinjaman menurut kegunaannya
  - a. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman digunakan untuk pemberian barangbarang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis atau pemberian barang untuk kebutuhan pangan lainnya.
  - b. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk berproduksi seperti pinjaman modal kerja.
3. Pinjaman menurut penarikanya
  - a. Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota.

- b. Pinjaman tidak langsung yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer.

#### **2.4.4 Prosedur Pelaksanaan Simpan Pinjam**

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pengertian prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon pinjaman, petugas dan pejabat pinjaman serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulir/formulir yang diperlukan dalam proses permohonan simpan pinjam hingga saat pencairan pinjaman.

Pengertian prosedur pelaksanaan simpan pinjam menurut Hendar (2010) adalah prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah rangkaian langkah atau aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang memerlukan dana.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan simpan pinjam adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh anggota koperasi yang akan melakukan pelaksanaan simpan pinjam dengan melakukan beberapa syarat atau ketentuan yang telah ditentukan.

#### **2.5 Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa**

Menurut Jhingan (2004), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nyata per kapita dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan pendapatan nyata per kapita lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi berbagai perubahan yang akan meningkatkan sumber – sumber produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nyata per kapita.

Menurut Badrudin (2012), pertumbuhan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dewasa, memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Inti potongan kalimat dari undang-undang tersebut adalah menjelaskan tentang roda perekonomian desa yang berasal dari tiap keluarga. Maksudnya, Kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterahkan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga, dan akhirnya dapat meluas di kalangan yang bukan dari anggota keluarga. Seperti pedagang, kalangan pemerintah, hingga kalangan pekerja pabrik, dan lain sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah suatu kegiatan produksi barang atau jasa dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan cara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa.

### **2.5.1 Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Pratama Rahardja (2008), Ciri-ciri Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Gross Domestic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP) dari tahun ke tahun (jangka pendek).
2. Kenaikan jumlah barang dan jasa.
3. Ditemukannya sumber-sumber produktif yang dapat didayagunakan.

### **2.5.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Jhingan (2004), Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada:

- a) Faktor Sumber Daya Manusia.
- b) Faktor Sumber Daya Alam.
- c) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d) Pembagian Kerja dan Skala Produksi.
- e) Sumber Daya Modal.

### **2.5.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno dalam buku Rudy Badrudin (2012), Teori pertumbuhan secara umum terbagi dalam tiga kelompok pendekatan adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Pertumbuhan Klasik**

##### **1) Teori Adam Smith**

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Adam Smith, ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

##### **2) Teori David Ricardo**

Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dalam buku Rudy Badrudin (2012), mengatakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada laju pertumbuhan output dan laju pertumbuhan penduduk.

##### **3) Teori Solow Swan**

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan ini dalam buku Rudy Badrudin (2012), pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor – faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

##### **4) Teori Joseph Schumpeter**

Teori Joseph Schumpeter ini dalam buku Rudy Badrudin (2012), menjelaskan tentang perkembangan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat terdiri dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.

##### **5) Teori Artur Lewis**

Teori pertumbuhan ekonomi Artur Lewis ini dalam Buku Rudy Badrudin (2012), membahas tentang proses transformasi industrialisasi pada tahap awal pembangunan kapitalis di Eropa dengan melihat hubungan antara sektor pertanian (tradisional) dan industri (modern) memasuki proses dalam perekonomian yang terjadi antara daerah pedesaan dan perkotaan dengan memasuki proses urbanisasi yang terjadi di daerah tersebut.

#### **b. Teori Pertumbuhan Modern**

##### **1) Teori Wal Witman Rostow**

Menurut Badrudin (2012), proses pertumbuhan dan pembangunan dibedakan dalam 5 tahap yaitu : Masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi.

##### **2) Teori Simon Kuznets**

Teori Badrudin (2012), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya.

##### **3) Teori Friederich List**

Menurut Badrudin (2012), perkembangan ekonomi didasarkan pada cara produksi dan hanya terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terdapat kebebasan perorangan dan kebebasan dalam berorganisasi politik.

##### **4) Teori Bruno Hilderbrand**

Menurut Bruno Hilderbrand dalam buku Rudy Badrudin (2012) perkembangan ekonomi didasarkan pada cara distribusi yang digunakan meliputi tahap perekonomian barter (natura), tahap perekonomian uang, perekonomian kredit.

##### **5) Teori Karl Bucher**

Menurut Karl Bucher dalam buku Rudy Badrudin (2012), Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi meliputi tahap produksi untuk kebutuhan sendiri (subsisten), tahap perekonomian kota.

##### **6) Teori Ketergantungan.**

Dalam teori ketergantungan ini ada dua aliran yaitu aliran Marxis-Neo Marxis dan aliran Non-Marxis. Aliran yang pertama menggunakan kerangka teori imperialisme yang tidak membedakan secara tajam antara struktur internal dan eksternal, karena kedua struktur tersebut dipandang sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Selain itu, aliran ini mengambil perspektif perjuangan internasional antara pemilik modal dengan kaum buruh. Oleh karena itu, menurut teori ini, pembangunan ekonomi untuk daerah pinggiran adalah dengan cara melakukan revolusi. Sedangkan aliran kedua melihat masalah ketergantungan dari perspektif nasional atau regional. Di mana aliran ini dengan tegas membedakan keadaan di dalam negeri dan luar negeri.

#### **2.5.4 Indikator Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa**

Suatu negara menjadi salah satu tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan. Pun, di desa perekonomian menjadi bagian tak terpisahkan dari tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Karenanya, diperlukan upaya untuk membangun perekonomian di desa. Hal, ini ditandai dengan kewenangan desa dalam mengatur pemerintahan dan perekonomian secara mandiri. Melalui UU Desa, masyarakat desa memiliki kewenangan untuk melakukan usaha-usaha sebagai upaya pembangunan ekonomi desa. Indikator dalam pembangunan ekonomi desa, berikut adalah indikator yang dapat digunakan:

1. Infrastruktur Desa Yang Baik

Infrastruktur menjadi indikator pertama dalam pembangunan ekonomi desa. Hal ini meliputi akses jalan di sekitar desa dan menuju desa. Kemudahan akses jalan ini menjadikan desa mendapatkan akses berkegiatan ekonomi lebih mudah dengan desa lain atau wilayah lain, dalam mengangkut atau memasarkan produk mereka. Karenanya pembangunan infrastruktur yang baik, menjadi indikator penting dalam usaha pembangunan ekonomi desa.

2. Fasilitas Umum Yang Memadai

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi desa, maka fasilitas umum di desa harus memadai. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang mendukung dan menunjang aspek kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Fasilitas ini di antaranya adalah; keberadaan pasar desa sebagai wadah terjadinya transaksi ekonomi. Selain fasilitas yang mendukung keberlangsungan ekonomi, fasilitas lain yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi adalah ketersediaan fasilitas seperti sekolah, puskesmas, balai pelatihan dan lain sebagainya.

3. Kemudahan Dalam Akses Informasi

Informasi menjadi sangat penting dalam erak digitalisasi dan keterbukaan. Maka, akses informasi yang baik bisa menjadi langkah dalam memajukan perekonomian desa, karena melalui informasi yang tersedia masyarakat dapat belajar dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Maka, indikator pembangunan ekonomi desa bisa dilihat dari bagaimana informasi masuk di desa tersebut. Apakah sudah baik atau belum. Bagaimana upaya, memberikan informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa. bagaimana mereka mengelola informasi yang baik untuk masyarakat desa, dan lain sebagainya.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia, adalah indikator dalam pembangunan ekonomi. Sumber Daya Manusia yang unggul, dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat keterampilan dalam pekerjaan, tingkat pemahaman terhadap informasi. Dengan sumber daya yang unggul, desa akan lebih mudah melakukan inovasi baik inovasi oleh warga masing-masing, atau inovasi bersama dalam membangun desa. Maka, menjadi penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Tingkat Pendapatan Penduduk

Tingkat pendapatan penduduk, tentu saja menjadi indikator dari keberhasilan dalam pembangunan ekonomi desa. Pendapatan penduduk apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, atau masih berada di bawah rata-rata. Tingkat pendapatan penduduk yang merata, menjadi contoh keberhasilan pembangunan ekonomi yang merata di sebuah desa.

Dari kelima indikator tersebut, bisa menjadi acuan bagaimana melihat proses pengembangan ekonomi desa di desa.

## 2.6 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Kumpulan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil	Publikasi
1	Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P, Eka Yulyana, SIP, M.Si, M.AP, Rachmat Ramdani, S.IP	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang	Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	a. Pencapaian Tujuan : Berdasarkan hasil temuan Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Di Desa Warungbambu  bahwa pemerintah Desa Warungbambu dan masyarakat desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen dan pengelolaan keuangan, masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUM Desa. Dengan demikian dalam pencapaian tujuan efektifitas pengelolaan BUM Desa masih belum efektif dan efisien.  b. Integrasi :  Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Warungbambu pemerintah dan	Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 1 No.2, Desember 2016 e-ISSN : 2528 - 2069

				<p>masyarakat membentuk forum musyawarah untuk membentuk BUM Desa tetapi terbatas kepada Kepala Dusun tidak melibatkan secara luas masyarakat desa. Masyarakat desa tidak mengetahui secara jelas tahapan-tahapan dalam pembentukan BUM Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan BUM Desa menimbulkan konflik baru dan disintegrasi di tengah masyarakat.</p> <p>c. Adaptasi :</p> <p>Efektivitas Pengelolaan BUM Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Di Desa Warungbambu belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUM Desa karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUM Desa dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUM Desa.</p>	
2	<p>Ni Kadek Diah Candra Kartika, Ni Kadek Sinarwati,</p>	<p>Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A</p>	<p>Efektivitas Pengelolaan Dana</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Danu Mandara dilakukan secara</p>	<p>e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1</p>

	Made Arie Wahyuni			tidak transparan dikarenakan pengelolaan dana hanya dilakukan oleh pengelola dan pendamping BUMDes Kerta Danu Mandara. Selain itu terdapat kendala dalam usaha dagang dan usaha Rumah Tangga Sasaran (RTS), namun dalam usaha kredit umum tidak terdapat suatu kendala. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes Kerta Danu Mandara hanya memenuhi 81% kategori, dan termasuk ke dalam kriteria cukup efektif.	(Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
3	Teten J. Hayat, Dahwadin, Jajang Abdul Nurhasan, Asep Hamdan Munawar	Efektivitas Peran BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu	<b>Independen:</b> Efektivitas Peran BUMDES <b>Dependen:</b> Peningkatan Pendekatan Masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dilakukan melalui unit usaha masyarakat, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. BUMDes mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa	Antaradhin: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1, No. 1, Juni 2018
4	Arief Hudiono	Efektivitas Program BUMDESA Dakaam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra	<b>Independen:</b> Efektivitas Program BUMDESA <b>Dependen:</b> Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa oleh BUMDesa Arto Doyo ada tiga, dua baru tahap perencanaan yaitu unit usaha pertanian, dan	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018

		Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas)		<p>pengadaan peralatan konveksi. Dan yang terealisasi baru satu, yaitu unit usaha simpan pinjam. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani dan Ahmad Wito Subagyo dengan tujuh indikator efektivitas program yaitu, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, ketepatan penggunaan dana, pengembalian dana, pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program, dan pengembalian dana sudah efektif, sedangkan untuk kelima lainnya masih belum efektif.</p>	
5	Made Suwecantara, Iman Surya, Gunthar Riady	<p>Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara)</p>	<p><b>Independent:</b> Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa <b>Dependen:</b> Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes Madani. BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli desa yang diberikan kepada pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan BUMDes</p>	<p>Journal Pemerintahan Integratif, 2018, 6(4): 624-634 ISSN 2337-8670</p>

				<p>Madani di Desa Santan Tengah belum maksimal, dimana BUMDes Madani belum mampu memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang penulis gunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum semua tercapai. Dimana pencapaian tujuan dari Bumdes Madani belum mencapai target awal dari organisasi. Sedangkan integrasi dan adaptasi organisasi sudah berjalan dengan baik. Kemudian temuan lainnya secara mendalam ialah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bumdes Madani yang utama adalah penyertaan modal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.</p>	
6	Dantika Ovi Era Tama	Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul	<p><b>Independen:</b> Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p> <p><b>Dependen:</b> Kesejahteraan Masyarakat di Desa</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang</p>	Universitas Negeri Yogyakarta, 2013

				dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.	
7	Angger Sekam Manikar	Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009	<b>Independen:</b> Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa	Menunjukkan bahwa BUMDes yang diterapkan di desa tersebut dinilai gagal dan belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang serta ketidakmampuan pengelola unit usaha dalam mengembangkan setiap usahanya sehingga terhambatnya tujuan BUMDes tersebut sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010

Sumber : data diolah penulis, 2019

### 2.6.2 Kerangka Pemikiran

Sedarmayanti (2009) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Diperkuat dalam penelitian Hayat (2018) dalam judul penelitian “Efektivitas Peran BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu” menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dilakukan melalui unit usaha masyarakat, seperti pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha produktif rumah tangga dan unit jasa lainnya. Beberapa unit tersebut membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. BUMDes mampu menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan perekonomian suatu desa, jika BUMDes yang dilakukan dengan cara mengelola atau memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki dengan baik dan membuat strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang dimiliki desa untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Listyawati (2017) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu objek penelitian dalam keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta yang kemudian dideskriptifkan dengan pedoman pada butir-butir pertanyaan dalam observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuisioner dilapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang lengkap dan akurat yang penyajiannya berupa kata-kata atau kalimat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan di kantor BUMDes “Kurnia Abadi” desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Menurut Umar (2003) Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas BUMDes pada unit simpan pinjam terhadap peningkatan perekonomian desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang.

##### **3.2.2 Unit Penelitian**

Unit analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu unit analisis Organisasi. Sumber data analisis tersebut berasal dari ketua dan pengelola BUMDes “Kurnia Abadi”, dan masyarakat desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang yang akan dijadikan sebagai sampel dan unit data dapat berasal dari tanggapan dari setiap responden yang didapat dari hasil penyebaran kuisioner maupun interview (wawancara).

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu BUMDes “Kurnia Abadi” desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat data kualitatif dengan metode diperoleh penulis langsung dari unit analisis yang diteliti yaitu individu atau orang dalam perusahaan/instansi/organisasi, kelompok individu atau dari perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Supomo dan Indriantoro (2016) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan jawaban dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer yang diperoleh oleh peneliti yaitu langsung dari BUMDes “Kurnia Abadi” desa Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan BUMDes Kurnia Abadi.

### 3.4 Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara deskriptif mengenai efektivitas BUMDes pada unit simpan pinjam terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan *survey* lapangan dalam pengambilan data. *Survey* lapangan berupa kuisisioner yang dibagikan kepada ketua dan pengelola BUMDes “Kurnia Abadi”, dan masyarakat desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang.

Untuk memudahkan proses analisis, maka variabel penelitian dapat di operasionalisasikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Pengukuran	Skala
Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (x)	1. Laba atau profit dan asset yang meningkat secara kontinu dan/atau konsisten	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Beban}}$	Rasio
	2. Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar	- Meluasnya cakupan/konsumen pasar - Terciptanya kemampuan menciptakan berbagai produk unit usaha	Ordinal

		- Adanya profit/keuntungan antara BUMDes dengan pihak lain	
	3. Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kepuasan pengelola BUMDes dan publik terhadap BUMDes tersebut</li> <li>- Meningkatnya kemampuan pengelola dalam menjalankan tugas dan fungsinya</li> <li>- Pengelolaan BUMDes telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku</li> </ul>	Ordinal
	4. Kecenderungan kepuasan masyarakat desa terhadap manfaat dari adanya BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat desa</li> <li>- BUMDes dapat meningkatkan perekonomian dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat desa</li> <li>- BUMDes dapat mempermudah akses transportasi menjadi baik</li> </ul>	Ordinal
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa (y)	1. Tingkat pendapatan penduduk	Pendapatan yang sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan penduduk	Ordinal
	2. Kualitas sumber daya manusia yang unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan usaha ekonomi</li> <li>- Pelatihan teknologi tepat guna</li> <li>- Tingkat Pendidikan masyarakat</li> </ul>	Ordinal
	3. Infrastruktur desa yang baik	Akses jalan yang mudah ditempuh untuk keperluan berekonomi antar desa	Ordinal

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2006) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.

Menurut Sugiyono (2008) Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Apabila Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan di hadapi di antaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya di berlakukan untuk Populasi.

Menurut Gulo (2010) Sampel merupakan himpunan bagian/subset dari suatu populasi, sampel memberikan gambaran yang benar mengenai populasi. Dalam penelitian ini peneliti menentukan Sampel secara *purposive sampling*. Menurut Notoatmodjo (2010) *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Sugiyono (2010) *Purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Peneliti menggunakan sampel yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu ketua dan pengelola BUMDes “Kurnia Abadi”, dan masyarakat desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan *survey* lapangan. Menurut Sugiyono (2013) *survey* adalah Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. *Survey* ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2010), terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan kuisioner.

### 3.7 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik (SPSS 25) dan skala Likert, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang telah diukur dalam penelitian. Skala Likert digunakan untuk menghitung hasil pertanyaan kuesioner. SPSS 25 digunakan untuk mengetahui keabsahan hasil kuesioner yang telah diisi oleh sampel.

#### 3.7.1 Statistik Deskriptif

Pengertian statistik deskriptif menurut Sugiono (2017) adalah statistik untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian dimana penulis turut berpartisipasi di lapangan dengan mencatat segala kejadian, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan untuk dibuatkan laporan hasil penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model skala Likert. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiono (2011) Skala Likert digunakan untuk mengungkapkan sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Skala yang digunakan dalam peneliti ini adalah skala Likert dengan alternatif pilihan jawaban sebagai berikut.

**Tabel 3.2**

#### Metode Skala dan Pengukurannya

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)
5	4	3	2	1

Untuk menetapkan peringkat dalam setiap variabel penelitian, dapat dilihat dari perbandingan antara aktual dan ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden, sedangkan skor ideal diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pertanyaan kuesioner dikalikan dengan jumlah responden. Skor ideal digunakan untuk menentukan *rating scale* serta jumlah seluruh jawaban. Hal tersebut dapat digambarkan dari rumus sebagai berikut Al-Bantani (2016):

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{skor aktual}}{\text{skor ideal}}$$

Keterangan:

Skor aktual= Jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan

Skor ideal= Skor atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Skor Ideal**

Rumus	Skala Jawaban
$5 \times 10 = 50$	SS
$4 \times 10 = 40$	S
$3 \times 10 = 30$	KS
$2 \times 10 = 20$	TS
$1 \times 10 = 10$	STS

Kemudian seluruh jawaban responden dimasukkan kedalam rating scale. Rating scale adalah alat pengumpulan kategori rancangan untuk memperoleh data dari hasil kuesioner dan wawancara secara umum dan keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Kriteria Rating Scale**

Nilai Jawaban	Skala Jawaban
50	Sangat Setuju
40	Setuju
30	Kurang Setuju
20	Tidak Setuju
10	Sangat Tidak Setuju

Selanjutnya hasil tersebut dikonfirmasi dengan kriteria presentase yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kriteria Presentase Skor Tanggapan Responden**

No.	Interval Nilai %	Keterangan
1.	80-100	Sangat Baik
2.	60-79	Baik
3.	40-59	Cukup Baik
4.	20-39	Kurang Baik
5.	0-19	Sangat Kurang Baik

Untuk mendapatkan hasil presentase diatas seluruh jumlah jawaban untuk setiap responden perlu dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan : p = Presentase

f = Frekuensi dari setiap jawaban kuesioner

n = Jumlah skor ideal

100 =Bilangan tetap

### **3.7.2 Uji Instrumen Data**

#### **3.7.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data diperoleh dari penyebaran kuisisioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan ataupun pernyataan dengan skor total pengamatan, Ririz (2013). Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau validnya suatu instrument (tingkat akurasi data), dimana instrument dikatakan valid apabila instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, instrument tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas yang dilakukan adalah Korelasi Pearson. Signifikansi korelasi Pearson yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi nya lebih kecil dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut valid dan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

#### **3.7.2.2 Uji Reliabilitas**

Menurut Ririz (2013) reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih. Reliabilitas dapat dikatakan menunjukkan kekonsistenan dari suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Makin kecil kesalahan pengukuran makin reliabel alat pengukur begitu pula sebaliknya. Pengujian keandalan alat pengukuran dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas menggunakan metode alpha ( $\alpha$ ). Menurut Ghozali (2016) Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur handal atau tidaknya suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang (responden) terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya jawaban responden terhadap kuisisioner penelitian. Reliabilitas diukur dengan

uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable apabila memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BUMDes Kurnia Abadi terletak di desa Tonjong, tepatnya di Jl. H. Sailan raya Jl. Raya Tonjong No.1, desa Tonjong, kecamatan Tajurhalang, kabupaten Bogor, provinsi Jawa Barat/Kode pos: 16320. Kurnia Abadi merupakan BUMDes yang termasuk kedalam kategori BUMDes yang berkembang dari 416 desa yang berada di kabupaten Bogor. BUMDes Kurnia Abadi didirikan pada tanggal 25 Oktober 2018 yang diketuai oleh Bapak Slamet Kurniadi yang dipilih langsung secara musyawarah desa. Namun, baru diresmikan pada tanggal 24 Februari 2019.

Awalnya BUMDes Kurnia Abadi memiliki beberapa rencana usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desanya, salah satunya unit usaha yang direncanakan akan didirikan oleh BUMDes Kurnia Abadi yaitu penyewaan alat pesta, penyewaan kios, pertanian, perdagangan (*Leu mart*), simpan pinjam, pegadaian, bio gas, serta pengembangan desa wisata. BUMDes Kurnia Abadi memiliki rencana untuk menambahkan unit usaha seperti *café* dan jasa penyedia internet. Namun, dari sekian banyak unit usaha yang direncanakan hanya unit simpan pinjam yang terealisasi sampai saat ini. Karena ketua BUMDes telah melihat kecondongan masyarakat atau antusiasnya masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan adanya “suntikan dana” atau lebih tepatnya dipinjamkan dana oleh BUMDes, namun ketua BUMDes yaitu Bapak Slamet Kurniadi tidak ingin mengambil resiko yang terlalu tinggi untuk hanya sekedar meminjamkan dana BUMDes. Akhirnya dibuatlah koperasi simpan pinjam di mana nasabahnya dapat menabung atau menyimpan uang di BUMDes Kurnia Abadi untuk dipergunakan kembali uangnya oleh masyarakat tersebut, selain itu untuk meminimalisir kecurangan atau penyalahgunaan manfaat BUMDes oleh masyarakat, ketua BUMDes yaitu bapak Slamet Kurniadi menegaskan bahwa adanya BUMDes simpan pinjam ini nasabahnya hanya khusus untuk masyarakat desa Tonjong dan tidak menerima masyarakat desa lain.

##### 4.1.1 Sejarah dan Pengembangan BUMDes Kurnia Abadi

**Gambar 4.1 Logo BUMDes Kurnia Abadi**



Sumber: BUMDes Kurnia Abadi

Menurut ketua BUMDes yaitu Bapak Slamet Kurniadi, sebelum didirikannya BUMDes Kurnia Abadi pada tahun 2018, empat tahun sebelumnya sudah didirikan BUMDes di desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang, namun ternyata tidak berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan BUMDes desa Tonjong. Akhirnya hanya berjalan dengan singkat dan tidak berkembang yang berujung dibubarkan BUMDes tersebut. Setelah empat tahun berlalu, dibentuklah kembali badan usaha milik desa (BUMDes) dengan kepengurusan serta keanggotaan yang baru, yaitu dengan didirikannya BUMDes Kurnia Abadi.

Menurut wawancara yang saya lakukan dengan ketua BUMDes, nama BUMDes “Kurnia Abadi” dijadikan sebagai nama atau logo untuk BUMDes di desa Tonjong berasal dari nama ketua BUMDes tersebut yaitu bapak Slamet Kurniadi yang disingkat menjadi Kurnia Abadi. Beliau memiliki filosofi untuk nama tersebut yaitu ingin menjadikan BUMDes di desa Tonjong menjadi BUMDes yang selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa (Kurnia) serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa selamanya (Abadi) dengan cara membuat program-program atau unit usaha yang diciptakan oleh BUMDes Kurnia Abadi.

BUMDes Kurnia Abadi didirikan pada tanggal 25 Oktober 2018 namun mengalami beberapa kendala dan membutuhkan proses yang panjang maka BUMDes Kurnia Abadi baru dapat diresmikan pada tanggal 24 Februari 2019.

#### **4.1.2 Kegiatan Usaha (Simpan Pinjam)**

Kegiatan usaha pada BUMDes Kurnia Abadi ini yaitu seperti penyewaan alat pesta, penyewaan kios, pertanian, perdagangan (leu mart), simpan pinjam, pegadaian, bio gas dan pengembangan desa wisata. Dari beberapa usaha yang didirikan yang berjalan cukup baik hanya beberapa dan tidak semuanya. Yang berjalan cukup baik hingga saat ini dari awal pendirian BUMDes adalah simpan pinjam, BUMDes simpan pinjam adalah jenis usaha yang bergerak dibidang perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui simpan pinjam yang dikelola. Dalam usahanya, simpan pinjam sudah memiliki kepercayaan (*Trust*) dari masyarakat desa setempat.

BUMDes Kurnia Abadi ini memiliki *presentase* pemberian bunga sebesar 2% dari jumlah pinjaman yang harus dibayarkan setiap bulannya, bunga diterapkan bukan hanya untuk mendapatkan *profit* tapi juga untuk menjaga nasabah agar dapat melakukan pembayaran secara tertib. Nasabah harus membayar cicilan pinjaman dan melunasinya dalam waktu 10 bulan ditambah dengan bunga sebesar 2%. Kegiatan usaha ini dilakukan untuk mengurangi jumlah masyarakat desa yang meminjam uang kepada bank keliling dan koperasi yang membutuhkan jaminan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa setempat.

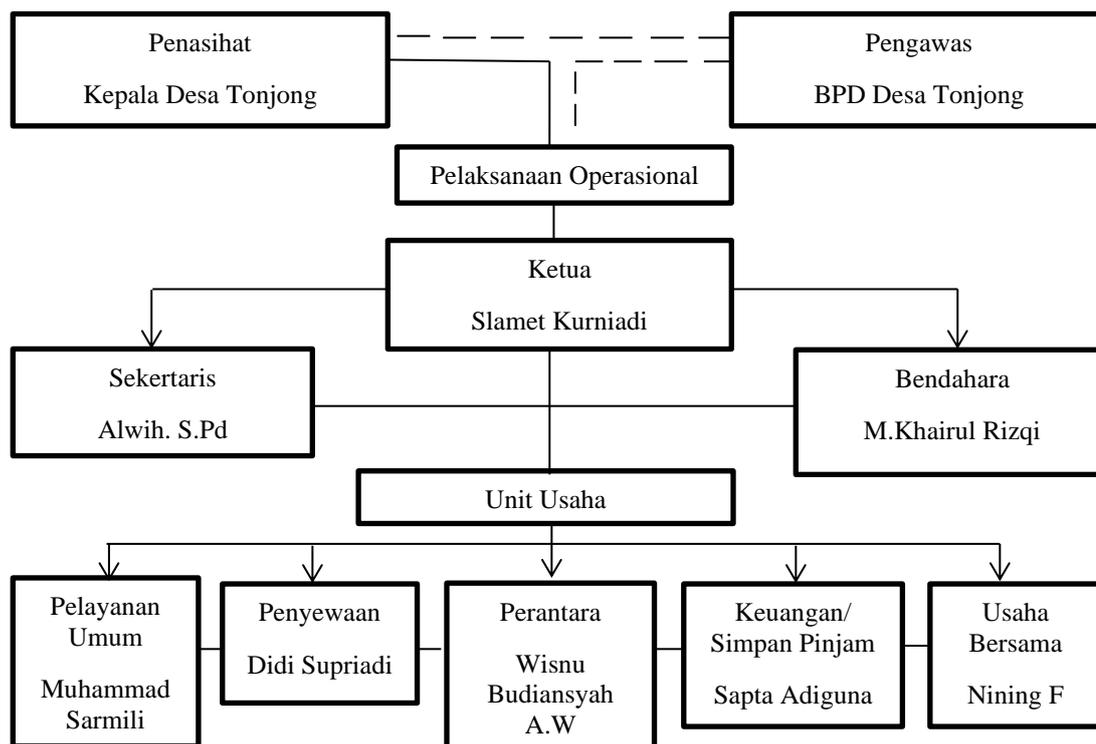
Untuk dapat meminjam dan menyimpan uang pada BUMDes Kurnia Abadi ini diharuskan menjadi anggota terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota simpan pinjam harus bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 30,000,- dan simpanan wajib sebesar minimal Rp 20,000,- tanpa maksimal pembayaran. simpanan wajib ini merupakan simpanan yang dapat diambil kembali oleh nasabah sedangkan

simpanan pokok tidak dapat diambil kembali setelah dibayarkan. Selanjutnya mengisi formulir pendaftaran anggota, surat ketentuan persetujuan kelayakan pemberian kredit lunak, dan surat keterangan domisili serta mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku didalam BUMDes Kurnia Abadi.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

**Gambar 4.2**

**Struktur Organisasi dan Uraian Tugas BUMDes Kurnia Abadi**



Struktur organisasi BUMDes menjelaskan kerangka atau bagan yang menggambarkan tentang hubungan kerja dan susunan pola hubungan yang menunjukkan kedudukan atau jabatan, tugas dan tanggungjawab secara jelas yang terdapat pada suatu perusahaan. BUMDes Kurnia Abadi ini mempunyai struktur organisasi secara jelas memperlihatkan jenjang wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh semua karyawan dari atasan sampai bawahan.

Namun dari struktur organisasi di atas, struktur organisasi tersebut belum berjalan dengan baik karena dalam kenyataannya terdapat rangkap jabatan. Di mana pada kenyataannya hampir semua tugas dilakukan oleh bapak Slamet Kurniadi sebagai ketua BUMDes desa Tonjong.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta dan hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengelolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian statistik. Tabel 4.1 berikut adalah statistik deskriptif dari variabel independen yaitu Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam, dan variabel dependen yaitu Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
X	60	35	59	49,73	5,300
Y	60	22	40	33,55	3,775
<i>Valid N (listwise)</i>	60				

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 60 orang. Dari 60 responden ini variabel independen (X) yaitu efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) pada unit simpan pinjam memiliki nilai minimum 35, nilai maksimum 59, nilai mean 49,73 dengan standar deviasi 5,300. Sedangkan pada variabel dependen (Y) yaitu peningkatan perekonomian masyarakat desa Tonjong kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor memiliki nilai minimum 22, nilai maksimum 40, nilai mean 33,55 dengan standar deviasi 3,775.

#### 4.2.1.1 Deskripsi Tanggapan Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan skor atas jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Hasil jawaban kemudian diolah dengan menggunakan skor ideal untuk menentukan *rating scale* dan jumlah seluruh jawaban kuesioner. Selanjutnya disesuaikan persentasenya dengan skala penilaian jawaban kuesioner yang digunakan, yaitu skala Likert, maka akan diperoleh skor akhir 20%-100% dari skor maksimum. Kategori yang diperoleh dengan membagi interval 20%-100% berdasarkan skala Likert, yaitu 1 sampai 5. Kategori pertama diperoleh dengan membagi 100% dengan 5, maka diperoleh batas terendah 20%. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka kriteria yang ditetapkan dapat disiapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kriteria Tanggapan Responden**

No	Skor	Keterangan
1.	20% - 36%	Mengidentifikasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam sangat tidak baik.
2.	37% - 52%	Mengidentifikasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam tidak baik.
3.	53% - 68%	Mengidentifikasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam cukup baik.
4.	69% - 84%	Mengidentifikasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam baik.
5.	85% - 100%	Mengidentifikasi tanggapan responden mengenai pernyataan-pernyataan yang diajukan bahwa Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam sangat baik.

Kumpulan data yang telah diperoleh dari sumbernya kemudian selanjutnya pengujian dengan beberapa uji statistic menggunakan Statistical Product Service Solution (SPSS) versi 25.

**Deskripsi Tanggapan Responden Variabel (X) Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam**

Hasil persentase skor kuesioner untuk variabel X dapat dilihat pada tabel 4.2, terlihat bahwa nilai total skor kuesioner atas variabel X adalah 35,5% dengan menggunakan rumus skor skala Likert, hal ini menunjukkan bahwa secara umum Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam sangat tidak baik. Yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Perhitungan Skor Kuesioner Variabel X yaitu Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam**

Responden	Pertanyaan												Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	5	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	46
<b>2</b>	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	58
<b>3</b>	4	5	4	5	5	5	5	3	5	5	3	5	54
<b>4</b>	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	54
<b>5</b>	3	3	4	4	4	4	4	5	5	2	3	5	52

<b>6</b>	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	55
<b>7</b>	3	5	3	2	4	4	4	4	4	4	2	4	43
<b>8</b>	2	2	3	3	1	3	4	4	4	4	3	4	37
<b>9</b>	5	4	4	5	4	4	5	4	4	3	4	5	51
<b>10</b>	4	2	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	47
<b>11</b>	5	3	2	4	4	5	5	5	5	2	5	4	49
<b>12</b>	3	3	3	4	3	3	4	5	5	4	3	4	44
<b>13</b>	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59
<b>14</b>	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	4	53
<b>15</b>	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	4	53
<b>16</b>	4	1	4	5	4	5	5	3	4	2	5	5	47
<b>17</b>	4	5	3	4	5	5	5	4	5	3	5	5	53
<b>18</b>	4	1	4	5	4	5	5	3	4	2	5	5	47
<b>19</b>	3	2	3	4	4	4	5	2	5	2	4	3	43
<b>20</b>	4	1	4	5	4	5	5	3	4	2	5	5	47
<b>21</b>	5	3	5	5	5	5	4	5	3	4	5	5	54
<b>22</b>	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
<b>23</b>	2	4	2	4	5	4	5	5	5	1	4	5	46
<b>24</b>	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	57
<b>25</b>	4	3	2	5	4	4	5	5	5	2	4	4	47
<b>26</b>	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	52
<b>27</b>	5	5	3	3	4	4	5	5	4	5	4	5	52
<b>28</b>	4	2	2	4	2	4	4	4	4	4	4	2	40
<b>29</b>	4	3	4	3	5	4	4	4	4	2	2	4	43
<b>30</b>	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
<b>31</b>	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	46
<b>32</b>	4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	43
<b>33</b>	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	46
<b>34</b>	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	46
<b>35</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
<b>36</b>	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	54
<b>37</b>	4	3	4	3	5	4	4	4	4	2	2	4	43

38	2	1	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	35
39	3	5	4	3	3	4	3	5	3	3	4	3	43
40	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	51
41	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	52
42	5	4	4	3	3	5	4	5	5	4	5	4	51
43	3	5	4	4	5	4	4	5	4	3	3	4	48
44	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	52
45	4	5	5	4	3	4	5	5	5	4	4	5	53
46	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3	4	4	52
47	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	57
48	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	55
49	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	56
50	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	51
51	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	56
52	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	53
53	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	50
54	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	50
55	5	5	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	54
56	4	5	4	3	5	4	4	5	5	5	4	4	52
57	5	5	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	52
58	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	54
59	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	49
60	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	56
<b>Presentase (%)</b>	33,6	31,9	32,2	34,4	34	36,1	37,3	36,5	36,9	31,3	34,1	35,8	<b>34,5</b>

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

1. Indikator Jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar  
 Dari pertanyaan poin ke 1-3 terdapat nilai skor yang diambil rata-ratanya sebesar 32,6%, hal ini menunjukkan bahwa cakupan konsumen/pasar, kemampuan menciptakan produk, dan peningkatan laba oleh masyarakat masih sangat tidak baik.
2. Indikator Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes

Dari pertanyaan poin ke 4-9 terdapat nilai skor yang diambil rata-ratanya sebesar 35,8%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan BUMDes sangat tidak baik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya partisipasi mereka terhadap program BUMDes.

3. Indikator Kecenderungan kepuasan masyarakat desa terhadap manfaat dari adanya BUMDes

Dari pertanyaan poin ke 10-12 terdapat nilai skor yang diambil rata-ratanya sebesar 33,7%, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap manfaat BUMDes, peningkatan lapangan pekerjaan, serta peningkatan akses transportasi yang baik untuk masyarakat masih sangat tidak baik.

### **Deskripsi Tanggapan Responden Variabel Y Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor**

Hasil persentase skor item kuesioner untuk variabel Y diperoleh sebesar 52,4% hal ini menunjukkan bahwa secara umum peningkatan perekonomian masyarakat desa Tonjong kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor masih tidak baik. Yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Perhitungan Skor Kuesioner Variabel (Y) Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor**

Responden	Pertanyaan								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	4	4	4	5	4	4	5	32
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	5	5	3	5	4	5	5	4	36
4	3	5	5	5	5	5	5	3	36
5	3	5	3	5	3	4	2	3	28
6	5	5	5	5	5	5	5	3	38
7	4	4	2	4	4	2	4	3	27
8	4	4	2	3	2	2	3	2	22
9	4	4	4	5	4	5	5	5	36
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	5	3	5	4	5	5	5	36
12	4	5	5	5	4	2	4	3	32
13	5	5	5	5	4	5	5	5	39
14	4	4	4	4	3	5	5	4	33

<b>15</b>	3	5	3	5	5	5	5	4	35
<b>16</b>	4	4	4	4	3	5	5	4	33
<b>17</b>	3	5	3	5	5	5	5	4	35
<b>18</b>	5	4	3	4	3	3	4	3	29
<b>19</b>	5	4	5	5	4	5	4	5	37
<b>20</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	40
<b>21</b>	2	4	4	5	4	5	2	2	28
<b>22</b>	4	5	4	4	5	5	5	5	37
<b>23</b>	4	4	5	5	5	5	4	4	36
<b>24</b>	3	5	5	5	5	5	5	2	35
<b>25</b>	4	4	5	4	4	5	4	4	35
<b>26</b>	2	4	4	4	4	4	4	4	30
<b>27</b>	4	4	4	5	4	4	3	2	30
<b>28</b>	4	4	4	4	4	4	5	4	33
<b>29</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	32
<b>30</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	32
<b>31</b>	3	4	4	4	4	4	3	4	30
<b>32</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	32
<b>33</b>	4	4	4	4	4	4	4	3	31
<b>34</b>	5	4	5	4	4	4	4	4	34
<b>35</b>	4	4	4	5	4	4	3	2	30
<b>36</b>	3	4	2	3	4	3	1	4	24
<b>37</b>	3	4	3	4	2	3	5	2	26
<b>38</b>	4	5	5	4	5	4	5	4	36
<b>39</b>	4	4	5	4	3	5	4	4	33
<b>40</b>	4	4	5	4	4	5	4	3	33
<b>41</b>	4	4	3	4	4	5	5	5	34
<b>42</b>	5	5	4	4	4	4	4	4	34
<b>43</b>	5	5	4	5	5	5	5	5	39
<b>44</b>	5	4	4	4	4	4	4	4	33
<b>45</b>	4	5	5	5	5	5	5	5	39
<b>46</b>	5	4	3	4	4	4	4	3	31

47	4	4	4	3	4	5	5	5	34
48	5	5	5	4	4	4	4	4	35
49	4	4	4	4	5	5	5	5	36
50	5	5	5	5	4	4	4	4	36
51	4	4	4	4	4	5	5	5	35
52	4	4	4	4	4	4	4	4	32
53	5	5	5	5	4	5	5	5	39
54	4	4	4	4	5	5	5	5	36
55	5	5	5	5	4	5	5	5	39
56	4	4	4	4	4	4	4	4	32
57	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58	4	4	5	4	4	5	5	4	35
59	5	5	4	4	4	4	4	4	34
60	3	5	3	5	5	5	5	4	35
<b>Presentase (%)</b>	50,4	54,8	50,8	54,3	51,5	54,6	53,5	49,4	52,4

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

1. Indikator Tingkat pendapatan penduduk  
Dari pertanyaan poin ke 1-3 terdapat nilai skor yang diambil nilai rata-ratanya sebesar 51,9%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan sesuai kebutuhan masyarakat desa Tonjong masih tidak baik.
2. Indikator Kualitas sumber daya manusia yang unggul  
Dari pertanyaan poin 4-6 terdapat nilai skor yang diambil rata-ratanya sebesar 53,4% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat cukup baik.
3. Indikator Infrastruktur desa yang baik  
Dari pertanyaan poin 7 dan 8 terdapat nilai skor yang diambil rata-ratanya sebesar 51,9%, hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur desa yang tidak baik.

#### 4.2.2 Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Indikator</b>	<b>r hitung</b>	<b>r table</b>	<b>Keterangan</b>
X.1	0,619	0,254	Valid
X.2	0,503	0,254	Valid
X.3	0,273	0,254	Valid
X.4	0,537	0,254	Valid
X.5	0,497	0,254	Valid
X.6	0,466	0,254	Valid
X.7	0,412	0,254	Valid
X.8	0,337	0,254	Valid
X.9	0,416	0,254	Valid
X.10	0,409	0,254	Valid
X.11	0,450	0,254	Valid
X.12	0,635	0,254	Valid
Y.1	0,857	0,254	Valid
Y.2	0,496	0,254	Valid
Y.3	0,508	0,254	Valid
Y.4	0,645	0,254	Valid
Y.5	0,477	0,254	Valid
Y.6	0,567	0,254	Valid
Y.7	0,722	0,254	Valid
Y.8	0,668	0,254	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2020.

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner yang berisi dari 2 variabel ini ada 60 kuesioner yang telah diisi oleh 60 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung > r tabel semua dinyatakan valid karena r hitung lebih dari r tabel.

#### **4.2.3 Uji reliabilitas**

Penelitian ini harus dilakukannya uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari >0,60 jika lebih kecil

maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena  $< 0,60$  Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reabilitas	Keterangan
Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam (X)	0,740	0,60	Reliabel
Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kec. Tajurhalang Kab. Bogor (Y)	0,769	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25, Data primer diolah 2020

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel tayangan segment tonight versus (X) dapat dilihat bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,740 > 0,60$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (X) dinyatakan reliabel. Hasil dari uji reliabilitas pada variabel tayangan segment tonight versus (Y) dapat dilihat bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,769 > 0,60$  hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel (Y) dinyatakan reliabel.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Manfaat BUMDes pada unit simpan pinjam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tonjong

Badan usaha milik desa (BUMDes) Kurnia Abadi yang terletak di desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor sudah berdiri dari tahun 2018 namun baru terealisasi di bulan Februari 2019. Adanya BUMDes Kurnia Abadi di desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang diketuai oleh bapak Slamet Kurniadi, dalam wawancaranya beliau berharap bahwa dengan adanya BUMDes desa Tonjong akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa Tonjong sendiri.

Menurut Torado dan Stephen Smith (2006) Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial individu dan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat di desa Tonjong masih belum merata, walaupun sudah adanya program BUMDes yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bogor. Dampaknya yaitu masih ada masyarakat yang tidak merasakan manfaat atas adanya BUMDes Kurnia Abadi dibidang simpan pinjam ini. Dari hasil wawancara dengan bapak Slamet Kurniadi sebagai ketua BUMDes, menurutnya masih banyak masyarakat desa yang tidak merasakan manfaat dari adanya BUMDes untuk peningkatan perekonomiannya. Didukung oleh pengumpulan data dan analisis bahwa nilai skor yang diperoleh yaitu sebesar 33,7% yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat desa terhadap manfaat adanya BUMDes sangat tidak baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu masyarakat yang bisa ikut serta menjadi nasabah di BUMDes Kurnia Abadi hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha saja, karena untuk meminimalisir kecurangan masyarakat guna memanfaatkan hasil uang dari BUMDes simpan pinjam. Adapun persyaratan yang harus diikuti oleh masyarakat desa untuk ikut serta menjadi nasabah di BUMDes Kurnia Abadi yaitu mengisi formulir identitas dan penyerahan SKU (Surat Keterangan Usaha) dari desa yang ditunjukkan kepada pihak BUMDes. Diharapkan dengan adanya BUMDes ini dapat mengembangkan usaha-usaha masyarakat kecil dan menengah yang ada di desa Tonjong

Diketahui bahwa dari seluruh masyarakat di desa Tonjong rata-rata mata pencarian masyarakat di desa Tonjong yaitu sebagai karyawan swasta dan tidak sedikit juga yang tidak bekerja (pengangguran), jadi sebagian besar masyarakatnya tidak dapat menikmati atas manfaat adanya BUMDes Kurnia Abadi di bidang simpan pinjam ini. Tetapi, ketua BUMDes sedang mempersiapkan perubahan baru agar

seluruh masyarakat di desa Tonjong merasakan manfaat dari adanya BUMDes, yaitu akan diadakannya “Bank Desa” di mana seluruh masyarakat di desa Tonjong diwajibkan ikut serta dalam berpartisipasi menjadi nasabah di bank tersebut, sehingga masyarakat akan dengan mudah mendapatkan pinjaman uang dari BUMDes tanpa ada syarat dan ketentuan yang khusus. Dari adanya perubahan tersebut ketua BUMDes berharap agar masyarakat desa dapat sejahtera dan merasakan manfaat dari adanya BUMDes Kurnia Abadi ini, karena ketua BUMDes ingin menjalankan motto yang telah dibuatnya yaitu “Dari Mereka Untuk Mereka”.

#### **4.3.2 Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong**

Pencapaian utama yang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri agar tidak ada kesenjangan sosial antar masyarakat serta mensejahterakan masyarakat dengan cara mengembangkan usahanya untuk mendapatkan penghasilan yang baik untuk kehidupannya.

Efektivitas BUMDes dapat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika, BUMDes yang dijalankan sudah berjalan dengan efektif maka akan menghasilkan hasil yang baik yaitu adanya peningkatan perekonomian masyarakat desa. Begitu pun sebaliknya, jika BUMDes tidak berjalan dengan efektif maka BUMDes tidak akan meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Menurut Kartika, Sirnawati, dan Wahyuni (2017) berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerta Danu Mandara dilakukan secara tidak transparan dikarenakan pengelolaan dana hanya dilakukan oleh pengelola dan pendamping BUMDes Kerta Danu Mandara. Selain itu terdapat kendala dalam usaha dagang dan usaha Rumah Tangga Sasaran (RTS), namun dalam usaha kredit umum tidak terdapat suatu kendala. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes Kerta Danu Mandara hanya memenuhi 81% kategori, dan termasuk ke dalam kriteria cukup efektif.

Adapun menurut Tama (2013), berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis efektivitas BUMDes Kurnia Abadi masih sangat tidak baik yang diketahui dari beberapa indikator, yaitu:

1. Indikator jaringan yang meningkat, termasuk meluasnya cakupan konsumen/pasar  
 Pada cakupan konsumen/pasar, kemampuan menciptakan produk, dan peningkatan laba oleh masyarakat masih sangat tidak baik, dikarenakan masih kurangnya masyarakat yang dapat menciptakan produk-produk inovatif serta menyebarluaskan produk tersebut yang menyebabkan tidak adanya kenaikan laba yang diterima oleh masyarakat.
2. Indikator Kepuasan pengelola BUMDes cenderung positif dan tinggi terhadap kinerja BUMDes  
 Kemampuan pengelolaan BUMDes sangat tidak baik, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya partisipasi mereka terhadap program. Dikarenakan BUMDes masih belum dapat memberikan upah/gaji kepada pengelola BUMDes, maka BUMDes berharap atas masyarakat yang sukarela untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola BUMDes. Namun, kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam mengembangkan BUMDes di desa yang menyebabkan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh ketua BUMDes yaitu oleh bapak Slamet Kurniadi. Akibatnya pengelolaan dalam unit simpan pinjam tidak berjalan dengan baik. Mulai dari pencatatan pelaporan tagihan sampai pencatatan keuangan keluar yang masih berantakan yang mengakibatkan masyarakat pun dapat melalaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua BUMDes juga mengakibatkan pendapatan dana BUMDes terhambat untuk dikembalikan kembali kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tidak merasakan dampak dari adanya BUMDes.
3. Indikator Kecenderungan kepuasan masyarakat desa terhadap manfaat dari adanya BUMDes  
 Kepuasan masyarakat terhadap manfaat BUMDes, peningkatan lapangan pekerjaan, serta peningkatan akses transportasi yang baik untuk masyarakat masih sangat tidak baik. Dikarenakan pengelolaan yang belum berjalan dengan sempurna dan masih banyak perencanaan yang belum terealisasi, mengakibatkan tingkat pengangguran di desa Tonjong masih cukup tinggi karena kurangnya lapangan pekerjaan serta akses jalan yang masih banyak belum diperbaiki sehingga masyarakat pun masih tidak merasakan manfaat adanya BUMDes.

Dari hasil pengumpulan data tersebut efektivitas BUMDes pada unit simpan pinjam di desa Tonjong ini hanya memiliki skor 34,5% yang masuk ke dalam kategori sangat tidak baik.

Sama halnya dengan penelitian Angger Sekam Manikar (2010) menunjukkan bahwa BUMDes yang diterapkan di desa tersebut dinilai gagal dan belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang serta ketidakmampuan pengelola unit usaha dalam

mengembangkan setiap usahanya sehingga terhambatnya tujuan BUMDes tersebut sebagai wadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis bahwa peningkatan perekonomian masyarakat di desa Tonjong kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor masih tidak baik yang diketahui dari beberapa indikator, yaitu:

1. Indikator Tingkat pendapatan penduduk  
Pendapatan sesuai kebutuhan masyarakat desa Tonjong masih tidak baik, dikarenakan tingginya kebutuhan sehari-hari daripada penghasilan.
2. Indikator Kualitas sumber daya manusia yang unggul  
Dalam pengelolaan BUMDes, masih belum adanya pelatihan yang diberikan BUMDes untuk masyarakatnya guna mengelola modal yang dipinjamkan oleh BUMDes kepada masyarakat. Namun, dalam Pendidikan masyarakatnya cukup baik, dikarenakan masyarakat desa Tonjong mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya dibantu dengan adanya bantuan pemerintah yaitu bantuan operasional siswa (BOS) dapat memudahkan masyarakat desa Tonjong untuk mendapatkan pendidikan yang layak minimal sampai sekolah menengah atas/kejurusan (SMA/K)
3. Indikator Infrastruktur desa yang baik  
Infrastruktur desa yang tidak baik. Masih banyak jalan-jalan di desa Tonjong yang masih rusak membuat akses jalan menuju desa Tonjong sedikit macet ketika sedang banyaknya kendaraan yang melewati jalan tersebut.

Berdasarkan hasil pengumpulan data bahwa peningkatan perekonomian masyarakat desa Tonjong menunjukkan nilai skor 52,4% yang menunjukkan bahwa peningkatan perekonomian desa Tonjong kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor masih tidak baik.

Jadi, efektivitas BUMDes Kurnia Abadi dan peningkatan perekonomian masyarakat di desa Tonjong kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor saling berkaitan antar keduanya. Dimana, efektivitas BUMDes Kurnia Abadi pada saat ini dapat dikatakan masih berjalan tidak baik karena masih banyak kendala yang masih dihadapi yaitu kurangnya antusias masyarakat untuk ikut partisipasi dalam adanya BUMDes baik menjadi pengurus BUMDes atau menjadi nasabah di BUMDes Kurnia Abadi, kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh BUMDes sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat adanya BUMDes. Dari tidak efektifnya BUMDes Kurnia Abadi berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakatnya. Perekonomian masyarakat di desa Tonjong masih masuk ke kategori tidak baik, dikarenakan masih banyak masyarakat yang memiliki pendapat yang belum sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Adapun akses jalan menuju desa Tonjong yang masih belum layak digunakan karena jalanan rusak.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti di BUMDes Kurnia Abadi desa Tonjong kecamatan Tajurhalang kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat desa yang tidak merasakan manfaat dari adanya BUMDes. Didukung oleh hasil pengumpulan data, bahwa nilai skor yang diperoleh yaitu sebesar 33,7% yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat desa terhadap manfaat adanya BUMDes sangat tidak baik. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu masyarakat yang bisa ikut serta menjadi nasabah di BUMDes Kurnia Abadi hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha saja dengan persyaratan yaitu nasabah dapat mengisi formulir identitas dan penyerahan SKU (Surat Keterangan Usaha) dari desa yang ditunjukkan kepada pihak BUMDes.
2. Efektivitas BUMDes dan peningkatan perekonomian masyarakat saling berkaitan antar keduanya. Dimana, efektivitas BUMDes Kurnia Abadi pada saat ini dapat dinyatakan masih berjalan tidak baik. Didukung oleh pengumpulan data dengan nilai skor yang diperoleh yaitu sebesar 34,5% yang menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi yaitu kurangnya antusias masyarakat untuk ikut partisipasi, baik menjadi pengurus BUMDes atau menjadi nasabah, kurangnya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh BUMDes sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat adanya BUMDes yang mengakibatkan perekonomian masyarakat di desa Tonjong masih termasuk ke kategori tidak baik.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diajukan untuk dapat menjadi pertimbangan bagi pihak BUMDes serta untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

##### **5.2.1 Saran Praktis**

1. Agar tujuan peningkatan perekonomian masyarakat melalui unit usaha simpan pinjam dapat tercapai dengan baik, sebaiknya BUMDes Kurnia Abadi memberikan jalan ataupun fasilitas kepada masyarakat penerima pinjaman modal untuk pemasaran produknya. Misalnya, membentuk mitra dengan para supplier untuk memasarkan produk usaha. Ketika pemasaran produk lancar maka penghasilan yang masuk dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat desa Tonjong.

2. Agar pengelolaan BUMDes Kurnia Abadi menjadi lebih baik, sebaiknya pihak BUMDes dapat memberikan upah gaji terhadap masyarakat desa yang akan berpartisipasi dalam mengelola atau mengurus BUMDes Kurnia Abadi.
3. Agar mengurangi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), sebaiknya BUMDes Kurnia Abadi dapat membukakan lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakatnya agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes Kurnia Abadi.

### **5.2.2 Saran Akademis**

Dikarenakan keterbatasan data dalam penelitian ini, penulis lebih menyarankan untuk melakukan kegiatan magang terlebih dahulu dalam mendapatkan data yang diperlukan agar data yang dimiliki lebih detail dan diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang BUMDes Kurnia Abadi jauh lebih baik dari penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung dan Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Al-Bantani, M. J. (2016). Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (Study Pada Koperasi Simpan Pinjam Perinka). Skripsi. Bogor: Universitas Pakuan.
- Badrudin dan Rudy.( 2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bastian dan Indra. (2007). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta; Salemba Empat.
- Bastian dan Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Blog.Bumdes.id. (2019). *Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Desa*. *Blog.bumdes.id*, [online]. Tersedia di <https://blog.bumdes.id/2019/05/%EF%BB%BFindikator-keberhasilan-pembangunan-ekonomi-desa/> [Diakses pada 25 Mei 2019]
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gulo. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo
- Halim dan Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hayat, T.J., Dahwadin, Nurhasan, J.A., dan Munawar, A.H. (2018). *Efektivitas Peran BUMDES Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu*. Antaradhin: *Jurnal Ekonomi Islam* [online] Vol. 1, No. 1.
- Hudiono, Arief. (2018). *Efektivitas Program BUMDESA Dakaam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdesa Arto Doyo Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Banyumas)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Jhingan, M.L. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartika, D.C., Sirnawati, N.K., dan Wahyuni, M.A. (2017). *Efektivitas Pengelolaan Dana pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* [online] (Vol: 8 No: 2).
- Kompasiana. (2019). *BUMDes*. Kompasiana [online]. Tersedia di [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) [Diakses pada 15 Des 2019].
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan kelembagaan Pengawasan*. Bandung: , Refika Aditama.

- Manikar, A.S. (2010). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nur dan Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12*. Yogyakarta: BPFE.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa (Cetakan Pe)*. Jakarta: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia.
- Peraturan pemerintah desa (Permendesa), pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia. (2015). *No. 4 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- Peraturan Pemerintah. (2005). *Nomor 72 tentang Desa*.
- Permendagri .(2010). *No. 39 tentang BUMDes*.
- Prathama dan Manurung. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: LPFEUI
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pustaka Utama*
- Putra, A, S. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Republik Indonesia.
- Purnamasari, Hanny., Yulyana, Eka., dan Ramdani, Rachmat. (2016). *Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang*. *e- Jurnal Politikom Indonesiana [online] Vol. 1 No.2, e-ISSN : 2528 – 2069*.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta. Erlangga.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Suwecantara, Made., Surya, Iman., dan Riady, Gunthar. (2018). *Dalam Meningkatkan*

- Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara). E-journal, 6(4): 624-634 ISSN 2337-8670.*
- Tama, O.E. (2013). *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tangkilisan dan Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grassindo.
- Tanjung, A.H. (2006). *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga
- Umar dan Husein. (2003). *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang. (2004). *Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah desa*.
- Undang-Undang. (2012). *Nomor. 17 tentang Perkoperasian*.
- Undang-Undang. (2014). *Nomor 6 tentang Desa*.
- Undang-Undang. (2014). *Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang. (2014). *Pasal 87 mengenai Semangat yang Melandasi Pendirian dan Pengelolaan*.
- Undang-Undang. (2014). *Pasal 88 mengenai Pendirian BUMDes*.
- Undang-Undang. (2014). *Pasal 89 mengenai Manfaat Berdirinya BUMDes*.
- Undang-Undang. (2014). *Pasal 90 mengenai Arah Pengembangan Bisnis BUMDes yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Desa*.
- Undang-Undang Dasar.(1945). *Pasal 27 ayat 2*.
- Undang-Undang Dasar.(1945). *Pasal 28 B ayat 2*.
- Undang-Undang Dasar.(1945). *Pasal 28 C ayat 1*.
- Undang-Undang Dasar.(1945). *Pasal 28 D ayat 2*.
- Undang-Undang Dasar.(1945). *Pasal 28 H ayat 1-4*.
- Widiyanti, N., dan Sunindhia. (2009). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1****KUESIONER PENELITIAN**

Yth. Saudara/i  
Responden  
Di tempat

Bersama ini saya:

Nama : Lina Rosalina  
NPM : 022116065  
Status : Mahasiswa S1, Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor  
No. HP : + 6289614018390

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir strata satu (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, yang mana salah satu persyaratannya adalah penulisan skripsi, maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor”.

Dengan segala kerendahan hati saya, untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan, sehingga diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya.

Sesuai dengan kode etik penelitian, data dan informasi yang diberikan Bapak/Ibu/Sudara/i akan dijamin kerahasiannya, dan hanya ditujukan untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan bapak/ibu mengisi kuisisioner ini adalah bantuan yang tak ternilai untuk saya.

Akhir kata, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti  
Lina Rosalina

## DATA RESPONDEN

Nomor Responden :  
Jenis kelamin :  Laki-Laki       Perempuan  
Usia saat ini : ..... tahun  
Pendidikan Terakhir :  SMA/SMK  
                                   Diploma 3  
                                   Strata 1  
                                   Strata 2  
                                   Lainnya  
  
Lama Bekerja :  
Bagian/Departemen :  
Jabatan :

Mohon dengan segala hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda checklist (✓) pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Diharapkan setiap pernyataan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Pilihlah jawaban untuk setiap pernyataan:

1. Jika jawaban anda “Sangat Tidak Setuju” (STS)
2. Jika jawaban anda “Tidak Setuju” (TS)
3. Jika jawaban anda “Netral” (N)
4. Jika jawaban anda “Setuju” (S)
5. Jika jawaban anda “Sangat Setuju” (SS)

**KUESIONER EFEKTIVITAS**  
**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA UNIT SIMPAN PINJAM**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	BUMDes dapat meningkatkan perluasan konsumen pasar.	1	2	3	4	5
2	BUMDes dapat meningkatkan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan suatu Produk dalam unit usaha	1	2	3	4	5
3	Terdapat keuntungan yang diperoleh dari pihak mitra (masyarakat, desa, serta pihak ketiga)	1	2	3	4	5
4	Terdapat kepuasan dari pengelola BUMDes dan masyarakat terkait adanya BUMDes.	1	2	3	4	5
5	Meningkatnya kemampuan pengelola BUMDes dalam menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing.	1	2	3	4	5
6	Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4	5
7	Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah desa	1	2	3	4	5
8	Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.	1	2	3	4	5
9	Masyarakat mendapatkan modal usaha dari keikutsertaan menjadi anggota (nasabah) BUMDes	1	2	3	4	5
10	Modal usaha sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.	1	2	3	4	5
11	BUMDes mampu meningkatkan perekonomian dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat desa	1	2	3	4	5

12	BUMDes dapat mempermudah akses transportasi sehingga menjadi lebih baik.	1	2	3	4	5
----	--	---	---	---	---	---

**KUESIONER PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA  
TONJONG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Pendapatan masyarakat telah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.	1	2	3	4	5
2	Adanya pendapatan/laba yang terus meningkat dalam mengembangkan usaha.	1	2	3	4	5
3	BUMDes dapat meningkatkan lapangan pekerjaan.	1	2	3	4	5
4	Diberikannya pelatihan oleh BUMDes kepada masyarakat mengenai pengelolaan modal simpan pinjam	1	2	3	4	5
5	Berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan.	1	2	3	4	5
6	Infrastruktur desa semakin baik dan berkualitas.	1	2	3	4	5
7	Akses jalan menjadi semakin mudah ditempuh untuk keperluan berekonomi antar desa.	1	2	3	4	5
8	Masyarakat dapat menikmati pelayanan BUMDes dengan baik.	1	2	3	4	5

## Lampiran 2



## FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA

### BUMDES KURNIA ABADI

Jl H. Nunung M. Sa'i No.1 Tonjong Kode Pos 16320  
0812 1979 8634 - 0815 9314 786

Yang bertanda tangan dibawah ini,saya :

Nama : .....

No. Registrasi : .....

No. KTP : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

No Telp/HP : .....

No.Rekening : .....

Mendaftarkan diri sebagai anggota simpan pinjam BUMDES dan bersedia membayar :

1. SIMPANAN POKOK, sebesar : Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
2. SIMPANAN WAJIB, sebesar : Minimal Rp.20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan maksimum tidak terbatas yang pembayarannya dilakukan melalui kolektor atau dibayar langsung ke BUMDES (pada tgl : 5 setiap bulannya)
3. SIMPANAN SUKARELA sebesar Rp. ....( )
4. INVESTASI DANA, sebesar Rp. ....( )
5. SIMPANAN LAINNYA, sebesar Rp. ....( )

Selanjutnya saya bersedia mengikuti segala Persyaratan dan Peraturan sebagai Anggota Simpan Pinjam BUMDES Ketentuan :

Perhitungan SHU disesuaikan dengan keaktifan Anggota Simpan Pinjam BUMDES KURNIA ABADI bagi anggota yang Mengundurkan diri sebelum akhir tahun arau sampai dengan 31 Desember maka tidak mempunyai hak atas SHU periode tersebut SHU hanya diberikan kepada anggota yang tercatat aktif sebagai Anggota Simpan Pinjam BUMDES KURNIA ABADI sampai dengan 31 Desember

Tonjong, .....20 ....

Hormat Saya,

( ..... )

NB : Mohon Lampirkan Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku

**Lampiran 3**

KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "KURNIA ABADI"  
 DESA TONJONG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 01/KEP/BUMDesa KA/2019

TENTANG

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SIMPAN PINJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

"KURNIA ABADI",

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam guna membantu dan melayani kebutuhan masyarakat desa perlu ditetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Kurnia Abadi" Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Kurnia Abadi" Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Kurnia Abadi" sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan akan dibenarkan sebagaimana mestinya jika terjadi kekeliruan dalam penetapannya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tonjong

Pada Tanggal : 01 Desember 2019

Badan Usaha Milik Desa

Ketua

Slamet Kurniadi

KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “KURNIA ABADI”  
DESA TONJONG

KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR NOMOR:  
01/KEP/BUMDesa-KA

/2019 TENTANG: STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)  
SIMPAN PINJAM

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) SIMPAN PINJAM  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “KURNIA ABADI” DESA  
TONJONG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

TUJUAN

Membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa Tonjong dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tonjong.

Berangkat dari tujuan tersebut, maka diperlukan sistem dan tata cara simpan pinjam sebagai berikut:

Pasal 1

NASABAH

Nasabah Unit Simpan Pinjam BUMDesa “Kurnia Abadi” adalah ;

- a. Nasabah Pribadi/Perseorangan
- b. Nasabah Kelompok/Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 2

JENIS SIMPANAN

Produk simpanan yang ada di BUMDesa “Kurnia Abadi” saat ini adalah:

Simpanan Wajib Peminjam.

Pasal 3

PROSEDUR SIMPANAN

## WAJIB PEMINJAM

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan Wajib Peminjam, merupakan simpanan yang harus ditunaikan oleh nasabah yang mengajukan Permohonan Pinjaman;
- b. Simpanan Peminjam ditentukan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pinjaman yang dikabulkan;
- c. Penyetoran Simpanan Wajib Peminjam, dilaksanakan sebelum pencairan pinjaman, dikantor Unit Simpan Pinjam BUMDes “Kurnia Abadi”;
- d. Simpanan Wajib Peminjam bisa ditarik pada saat pelunasan pinjaman dengan perhitungan jasa dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Pasal 4

#### JASA SIMPANAN DAN KETENTUAN LAIN

- (1) Suku jasa simpanan wajib peminjam ditentukan oleh BUMDesa “Kurnia Abadi” dan diinformasikan kepada Nasabah.
- (2) BUMDesa “Kurnia Abadi” berhak mengubah ketentuan dan persyaratan umum dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Setiap perubahan nama, alamat, tanda tangan dan data lainnya dari nasabah, agar segera diinformasikan kepada BUMDesa “Kurnia Abadi” secara tertulis. BUMDesa “Kurnia Abadi” tidak bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dari penyalahgunaan tanda kepesertaan simpanan sebagai akibat adanya perubahan data anggota.

### Pasal 5

#### JENIS PINJAMAN

Produk Pinjaman yang ada di BUMDesa “Kurnia Abadi” saat ini adalah:

- (1) Usaha Ekonomi Micro / Usaha Keuangan Micro (UEM/UKM);  
Diperuntukkan bagi masyarakat secara Individu maupun kelompok dengan jenis usaha sebagai berikut:
  - a. Perdagangan;
  - b. Perindustrian;
  - c. Peternakan;
  - d. Pertanian;
- (2) Kredit Multi Guna (KMG); diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau untuk konsumtif, antara lain:

- a. Pembelian Sepeda Motor;
  - b. Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Biaya Sekolah.
- (3) Pinjaman Sebrakan.

#### Pasal 6

#### PROSEDUR PEMINJAMAN

- (1) Setiap calon nasabah sebelum mengajukan permohonan pinjaman wajib mengisi form pinjaman yang disebut formulir permohonan pinjaman dengan lengkap sesuai isi dan ketentuan yang tertulis di dalam form tersebut.
- (2) Formulir permohonan pinjaman harus ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUMDesa “Kurnia Abadi”.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana ayat (2) diketahui oleh suami/istri pemohon dan dukuh setempat.
- (4) Dalam hal pemohon belum/tidak mempunyai suami/istri, formulir permohonan diketahui oleh ahli waris dan dukuh setempat.
- (5) Kelengkapan dan kebenaran data dalam pengisian formulir permohonan pinjaman sebagai dasar pengurus dalam memberikan pinjaman.
- (6) Sebelum direalisasikan terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap kelayakan permohonan pinjaman oleh petugas.
- (7) Mengisi Surat Perjanjian Kredit sesuai dengan kesepakatan.
- (8) Peminjam reguler menganut sistem waiting list atau antrian.
- (9) Peminjam khusus/sebrakan (exceptional) tidak menganut sistem antrian, namun harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui Kepala Desa.
- (10) Formulir Peminjam Kelompok diketahui ketua dan bendahara kelompok, disaksikan 2 orang anggota kelompok dan diketahui oleh kepala desa.

#### Pasal 7

#### SYARAT-SYARAT PEMINJAM

- (1) Peminjam adalah warga masyarakat Desa Tonjong dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk(KTP).
- (2) Melampirkan foto kopi KTP/SIM.
- (3) Membayar biaya Adminitrasi sebesar Rp.30.000 ( tiga puluh ribu rupiah )
- (4) Mempunyai tabungan minimal 10 % dari jumlah pinjaman.

- (5) Bagi peminjam lanjutan ketentuannya selain yang tertera pada pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditambah sebagai berikut:
- a. Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dapat mengajukan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;
  - b. Jika mempunyai catatan tunggakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali angsuran, maka dapat mengajukan jumlah yang sama dengan pinjaman sebelumnya.
- (6) Membuat surat pernyataan penyertaan agunan berupa barang/harta sebanding dengan jumlah pinjaman yang diajukan.
- (7) Tidak mempunyai catatan Daftar Hitam/*black list* dikelompok atau lembaga keuangan lainnya.

#### Pasal 8

#### BESARNYA PINJAMAN

- (1) *Plafound* pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang terlebih dahulu mengacu pada hasil analisa kredit dan pada *track record* pinjaman sebelumnya.
- (2) Pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMDes “Kurnia Abadi”.
- (3) Nilai realisasi pinjaman mutlak wewenang Pengelola tidak bisa diganggu gugat.

#### Pasal 9

#### JANGKA WAKTU ANGSURAN

Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan, dalam jangka waktu 12 bulan.

#### Pasal 10

#### JASA PINJAMAN

- (1) Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) perorangan sebesar 2 % per bulan *flat*.
- (2) Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) Kelompok sebesar 2 % per bulan *flat*.
- (3) Ketentuan jasa Pinjaman Multi Guna (PMG) perorangan sebesar 2%.
- (4) Ketentuan jasa Sebrakan sebesar 5 % Maksimal 3 bulan Pelunasan.

#### Pasal 11

## PELUNASAN DAN TAKEOVER

Bagi anggota yang akan melunasi hutangnya sebelum selesai batas waktu kredit/ angsurannya maka wajib melunasi sisa hutang (pokok ditambah jasa) dan bisa mengajukan pinjaman berikutnya.

### Pasal 12

#### LAIN-LAIN

- (1) Anggota yang mengajukan pinjaman karena kepentingan yang sangat mendesak (*urgent*) akan mendapat prioritas (tidak menunggu antrian/*waiting list*) dengan melampirkan surat keterangan resmi dari Kepala Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana ayat (1) di atas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan di Kas Simpan Pinjam BUMDes “Kurnia Abadi”

### Pasal 13

#### KETENTUAN PENUTUP

SOP ini berlaku bagi Nasabah Simpan Pinjam BUMDes “Kurnia Abadi” dengan ketentuan, hal-hal lain yang belum di atur akan ditentukan kemudian oleh Pengelola BUMDes “Kurnia Abadi”

Ditetapkan di : Tonjong

Pada Tanggal : 01 Desember 2019

Mengetahui,

Badan Usaha Milik Desa Kurnia Abadi

Kepala Desa Tonjong

Ketua  
BUMDes